

**PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA PROVINSI ACEH**

Aditya Akbar  
NPP. 31.0003

*Asal Pendaftaran Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

E-mail: aditya.a1305@gmail.com  
Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si.

**ABSTRACT**

**Background:** Occupational Safety and Health (K3) is the government's effort to protect all activities related to the workplace from the risk of work accidents. **Objective:** The aim of this research was to find out how K3 is implemented in the BPBD of Southwest Aceh Regency, to find out the factors inhibiting the implementation of K3, and to find out the efforts made to overcome obstacles to the implementation of K3 in the BPBD of Southwest Aceh Regency. **Method:** The research design used is qualitative research with descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. As well as data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results:** Based on the research results, the implementation of K3 in the BPBD of Southwest Aceh Regency which includes the work environment, temperature, lighting, use of work equipment and employee conditions has not been fully implemented well, this can be realized by looking at the factors inhibiting the implementation of K3, namely the lack of Facilities and infrastructure owned, lack of awareness of workers regarding the implementation of K3 which can cause the risk of work accidents, and limited budget are factors inhibiting the implementation of K3 at the BPBD of Southwest Aceh Regency. **Conclusion:** suggestions that can be made are submitting budget proposals to optimize facilities and infrastructure to support the implementation of K3, socializing the implementation of K3 continuously, implementing and adhering to the K3 Law and requirements, as well as monitoring and supervising the implementation of K3.

**Keywords:** Occupational Safety and Health, Work Accident, Work Risk

**ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya pemerintah untuk melindungi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan tempat kerja dari risiko kecelakaan kerja. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mengetahui faktor penghambat penerapan K3, serta untuk mengetahui upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala pada penerapan K3 di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Hasil:** Berdasarkan hasil penelitian, penerapan K3 pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya yang meliputi lingkungan kerja, suhu, penerangan, pemakaian peralatan kerja, dan kondisi pegawai belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, hal tersebut dapat disadari dengan melihat dari segi faktor penghambat penerapan K3 yakni kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, kurangnya kesadaran pekerja terhadap penerapan K3 yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja, dan anggaran yang terbatas menjadi faktor penghambat penerapan K3 pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya. **Kesimpulan:** saran yang dapat disampaikan yaitu melakukan pengajuan anggaran dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan K3, mensosialisasikan mengenai penerapan K3 yang berlaku secara terus menerus, melaksanakan dan mempedomani Undang-undang dan persyaratan K3, serta melakukan pemantauan pengawasan terhadap pelaksanaan K3.

**Kata Kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, Risiko Kerja**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sering mengalami bencana alam. Memang letak geografis Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan dikelilingi oleh cincin api. Cincin Api merupakan titik pertemuan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudera Hindia di sepanjang pantai selatan Indonesia, serta lapisan antara lempeng Pasifik dan lempeng Asia di sepanjang Kepulauan Maluku. Keadaan inilah yang menyebabkan Indonesia mempunyai banyak patahan dan gunung berapi. Hal ini menyebabkan terjadinya bencana alam akibat letusan gunung berapi dan gempa bumi tektonik. (Suprayitno, Asih & Soemitro,2019). Dari realitas bencana alam tersebut di atas, pemerintah sangat berkepentingan dalam penanggulangan bencana alam. Sebagai wujud tanggung jawab dalam penanggulangan bencana dalam negeri, pemerintah berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat, sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara, bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Menyadari tanggung jawab tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam. Selanjutnya, setelah berlakunya undang-undang ini, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB merupakan lembaga pemerintah yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam dalam skala nasional, kemudian dalam skala yang lebih kecil seperti provinsi, kabupaten dan kota, penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD. Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan bencana alam di Indonesia, BNPB dan BPBD saling melengkapi dalam upaya penanganan bencana alam di Indonesia. Bekerja di bidang kebencanaan mempunyai resiko yang sangat tinggi sehingga penting bagi BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya untuk memperhatikan keselamatan, keamanan dan kesehatan para pegawainya. Petugas BPBD yang menangani bencana di Kabupaten Aceh Barat Daya berpotensi menjadi korban kecelakaan kerja. Sehingga perlu ditinjau kembali metodenya pelaksanaan K3 di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, serta upaya mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja.

Keselamatan kerja adalah cara utama untuk mencegah kecelakaan, kecacatan, dan yang terburuk, kematian. Kecelakaan seringkali terjadi karena kelalaian pekerja itu sendiri atau pelanggaran peraturan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengatur keselamatan kerja dimanapun seperti di darat, di atas air, di darat, bahkan di udara yang tempat-tempat tersebut

tetap berada dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya pemerintah untuk melindungi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan tempat kerja dari risiko kecelakaan. K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi dan menghilangkan resiko penyakit akibat kerja (PAK) dan kecelakaan kerja (KAK) dan kebijakan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja agar termotivasi sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. K3 sangat penting dalam mengurangi angka kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian bagi instansi, organisasi dan negara.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Kecelakaan Kerja Di Indonesia**

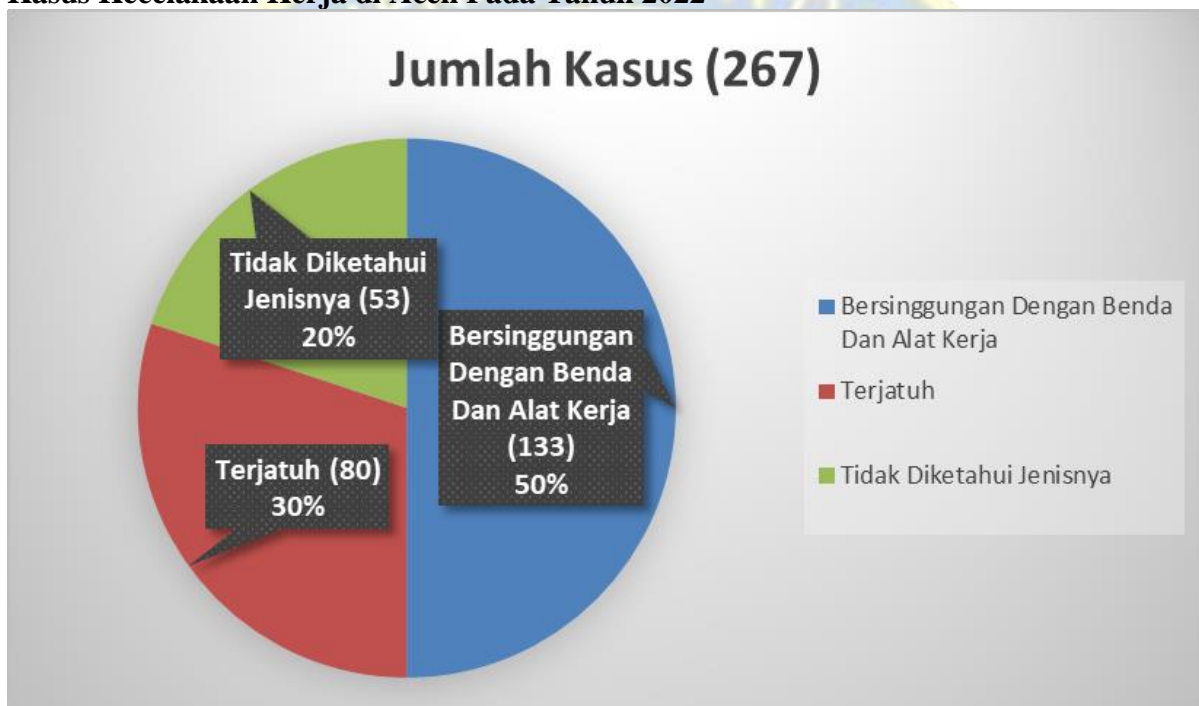


Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2023

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2022, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 1.1, sejak tahun 2017 jumlah kecelakaan kerja yang tercatat sebanyak 123.040 kasus, kemudian jumlah tersebut meningkat sebesar 40,94% menjadi 173.415 kasus pada tahun 2018, dan meningkat lagi sebesar 5,43% hingga mencapai 182.835 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah tersebut kecelakaan kerja meningkat. meningkat lagi sebesar 21,28% menjadi 221.740 kasus, kemudian meningkat lagi sebesar 5,65% menjadi 234.270 kasus pada tahun 2021 dan angka terakhir tahun 2022 meningkat lagi sebesar 13,26% menjadi 265.334 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Data di atas menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia tergolong tinggi dan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan K3 belum dilaksanakan secara maksimal oleh pengusaha dan juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat acuh terhadap pelaksanaan K3 khususnya pada suatu organisasi atau instansi pemerintah dan belum memahami pentingnya pelaksanaan K3. K3 merupakan faktor yang mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Selain ketidakpedulian sosial, faktor keterampilan dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi kecelakaan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, 23,8% dari 275,77 juta penduduk Indonesia memiliki tingkat pendidikan rendah, Angka ini terdiri dari 66,07 juta jiwa penduduk yang tidak atau belum sekolah dan 64,3 juta jiwa penduduk yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Permasalahan inilah yang menjadi penyebab kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya K3.

Pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai risiko pekerjaan yang sangat tinggi, khususnya pekerja lapangan. Tentu saja fakta tersebut perlu mendapat perhatian lebih agar para pekerja BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dapat tetap menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatannya dalam menjalankan tugasnya. sehingga para pekerja dapat merasa aman dan terlindungi, tidak hanya bagi para pekerjanya tetapi juga baik bagi kantor BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, karena dengan melindungi para pekerja maka kerugian dapat dikurangi bahkan dihindari. Angka kecelakaan kerja pada tahun 2022 tercatat 267 kasus. Dari total kecelakaan kerja tersebut berdasarkan pie chart di atas dapat diketahui sebanyak 133 kasus atau 50% kecelakaan kerja terjadi akibat bersinggungan dengan benda dan alat kerja. Terdapat 80 kasus atau 30% kecelakaan kerja berupa terjatuh. Selanjutnya 53 kasus atau 20% kecelakaan kerja lainnya tidak diketahui jenis kecelakaannya.

**Gambar 1. 2**  
**Kasus Kecelakaan Kerja di Aceh Pada Tahun 2022**



*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2022)*

Data pada Gambar 1.2 yang menjadi fakta masih banyak pekerja acuh akan keselamatan serta kesehatan kerjanya, tidak hanya itu saja menurut data BPJamsostek, pekerja yang memiliki jaminan ketenagakerjaan sampai saat ini total yang aktif sebanyak 75.000 yang terdiri dari pekerja formal dan informal atau mandiri. Sementara pekerja aktif di Aceh Barat Daya menurut BPS mencapai sekitar 57.500. Jumlah tersebut menjadi gambaran bahwa total pekerja yang terlindungi atau total pekerja yang memiliki jaminan ketenagakerjaan sudah melebihi 50 persen, namun dengan minimnya edukasi kepada masyarakat tentang k3 membuat jumlah kasus terus meningkat setiap tahunnya. (BPJamsostek, 2022).

Setiap tugas pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sangat beresiko, karena ruang lingkup BPBD adalah penanggulangan bencana sehingga resiko kecelakaan kerja tinggi. Data cedera di tempat kerja, sekecil apa pun, dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengidentifikasi tren jangka panjang, termasuk peningkatan dan penurunan kesehatan pekerja. (Jackson, 2011). Menurut Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS), Ada beberapa jenis bahaya yang mungkin ditemui oleh pekerja di tempat kerja atau di lingkungan kerja, yaitu: (1) Bahaya dari segi kimia; (2) Bahaya yang termasuk didalam

kelompok ergonomic; (3) Bahaya dari segi biologi; (4) Bahaya dari segi psikososial; dan (5) Bahaya dari segi Keselamatan Kebijakan K3 merupakan salah satu bentuk implementasi dalam proses menjalankan aktivitas kerja, oleh karena itu pelaksanaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus selalu diawasi dan diingat. Berdasarkan Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 adapun kebijakan dalam syarat standar pelaksanaan K3 perkantoran ialah :

**Tabel 1.1**  
Syarat Pelaksanaan K3

<b>Syarat Standar Pelaksanaan K3 Perkantoran</b>	
1.	Melakukan pelaksanaan dan perawatan ruang perkantoran
2.	Pengolahan listrik dan sumber api
3.	Persyaratan dan tata cara evakuasi
4.	Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja
5.	Tersedianya kotak P3K
6.	Penyediaan air bersih
7.	Tersedianya toilet
8.	Aspek fisika, kimia dan biologi
9.	Keluasan dari tempat kerja
10.	Kursi, koridor/lorong, dan durasi lamanya kerja

*Sumber: Permenkes Nomor 48 Tahun 2016, diolah oleh peneliti (2023)*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan kebijakan K3, peneliti melakukan penelitian mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi standar berupa praktik keselamatan kerja di tempat kerja yang didedikasikan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga ini merupakan organisasi pemerintah yang memiliki risiko pekerjaan tinggi sehingga penerapan standar K3 merupakan praktik yang sangat baik dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah khususnya keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu peneliti memilih topik penelitian “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya”.

## **1.2. Kesenjangan Masalah**

Menurut data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, angka kecelakaan kerja di Indonesia meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2022, angka kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat selama 6 tahun terakhir. Berdasarkan Gambar 1.1, sejak tahun 2017 jumlah kecelakaan kerja yang tercatat sebanyak 123.040 kasus, kemudian jumlah tersebut meningkat sebesar 40,94% menjadi 173.415 kasus pada tahun 2018, dan meningkat lagi sebesar 5,43% hingga mencapai 182.835 kasus pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah tersebut kecelakaan kerja meningkat. meningkat lagi sebesar 21,28% menjadi 221.740 kasus, kemudian meningkat lagi sebesar 5,65% menjadi 234.270

kasus pada tahun 2021 dan angka terakhir tahun 2022 meningkat lagi sebesar 13,26% menjadi 265.334 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai risiko pekerjaan yang sangat tinggi, khususnya pekerja lapangan. Tentu saja fakta tersebut perlu mendapat perhatian lebih agar para pekerja BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dapat tetap menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatannya dalam menjalankan tugasnya. sehingga para pekerja dapat merasa aman dan terlindungi, tidak hanya bagi para pekerjanya tetapi juga baik bagi kantor BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, karena dengan melindungi para pekerja maka kerugian dapat dikurangi bahkan dihindari.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Nadya Pri Muniasari (2021) yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Ergonomi Perkantoran untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan di PT Coda Integra Intermusa”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menjadikan individu sebagai subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ergonomi perkantoran di PT Coda PT Coda Integra Intermusa telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari data yang diolah peneliti berdasarkan indikator pengukuran kinerja, khususnya penetapan tujuan, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan ergonomi perkantoran di PT Coda Integra Intermusa antara lain perencanaan pencahayaan, perencanaan suhu ruangan/suhu udara dan perencanaan suara serta penggunaan seluruh prinsip pengelolaan ruang kantor yaitu prinsip jarak terpendek, prinsip pemanfaatan seluruh ruangan, prinsip perubahan segala sesuatu, prinsip perubahan struktur ruangan, dan prinsip Tata Tertib Kerja untuk proses pegawai dalam bekerja. Dengan demikian, PT Coda Integra Intermusa memiliki stabilitas dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pekerja. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek penelitian peneliti sebelumnya sama dengan subjek pada penelitian ini yaitu subjeknya adalah karyawan atau pegawai, hal ini terlihat dari peneliti sebelumnya meneliti tentang ergonomi perkantoran di PT. Coda Integra Intermusa, penelitian ini yang dilakukan peneliti dan peneliti sebelumnya juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mempelajari kondisi objektif yang alamiah dan peneliti sama-sama berfungsi sebagai instrumen utama dalam penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada topik yang diteliti, pada penelitian sebelumnya topik yang diteliti adalah ergonomi yaitu interaksi antara pegawai dengan aspek pekerjaan, Sedangkan pada penelitian ini peneliti mengkaji tentang penerapan K3 di BPBD, juga mempunyai perbedaan dengan teori yang digunakan pada penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori efektivitas menurut H. Emerson yang penelitiannya melibatkan pengukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, Sedangkan penelitian ini menggunakan teori menurut Mangkunegara dimana peneliti menggunakan teori tersebut untuk melihat penerapan K3 pada tata letak lingkungan kerja, pada suhu udara, pencahayaan, penggunaan peralatan kerja dan kondisi pegawai di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Wahdania (2021) dalam penelitian ini berjudul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan serta Kesehatan Kerja di PT Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)” Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah yang berada pada PT Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU), sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re- checkingin atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU) telah dilaksanakan dengan baik, hal ini terlihat melalui observasi peneliti terhadap indikator kinerja penerapan keselamatan kerja. dan sistem

manajemen kesehatan di PT Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU). Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah subjek penelitiannya adalah para pekerja atau karyawan. Penelitian sebelumnya juga mempunyai persamaan, antara lain pertimbangan sarana dan prasarana yang ada serupa dengan yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan yang membedakan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah lokasi penelitiannya, karena peneliti sebelumnya menggunakan kawasan industri sebagai pusat penelitiannya, sedangkan penelitian ini menjadikan perkantoran sebagai pusat penelitiannya. Penelitian-penelitian sebelumnya juga mempunyai perbedaan dalam metode penelitiannya, peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian deskriptif observasi sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Balqis Shahibah (2012) dalam penelitiannya mengambil judul “Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Tenaga Kerja Pembangunan Proyek Double-Double Track Kereta api Jalur Jatinegara- Manggarai Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012” Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif sehingga menjadikan individu sebagai subjek penelitian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan K3 bagi pekerja kereta api jalur ganda jalur Jatinegara-Manggarai kurang baik karena masih adanya penerapan keselamatan kerja yang belum dilaksanakan secara maksimal oleh PT Utama Karya.

Jurnal yang berjudul "Pengaruh Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Di Surabaya" oleh Arifin, dkk. (2024) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik menunjukkan bahwa penerapan K3 dan lingkungan kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan K3 dan lingkungan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawannya. Jurnal yang berjudul "Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur" oleh Kharisma, C. E. P. (2022) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa meskipun pelaksanaan K3 masih kurang optimal di BPBD Kabupaten Ngawi, tetapi terdapat tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa temuan, seperti peningkatan kesadaran pegawai terhadap K3, sarana dan prasarana K3, pelatihan K3 bagi pegawai, dan pengawasan terhadap pelaksanaan K3. Hal senada juga disampaikan dalam jurnal “Analisis Penerapan Kesehatan Dan Kesehatan Kerja Pada BPPD Kabupaten Nias Utara” oleh Zega (2024) mengungkapkan bahwa penerapan K3 di BPPD Kabupaten Nias Utara masih belum optimal, sehingga perlu meningkatkan penerapan K3 di BPPD Kabupaten Nias Utara, yaitu: (1) Melengkapi peralatan K3 dan merawatnya dengan baik; (2) Memberikan pelatihan K3 bagi pegawai secara berkala; (3) Melakukan sosialisasi dan edukasi K3 bagi pegawai; (4) Menyusun SOP untuk K3, dan (5) Membangun sistem pemantauan dan evaluasi K3.

Jurnal yang berjudul "Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Sarana Prasarana Terhadap Produktivitas Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara" oleh Lontaan, G. J., Taroreh, dkk. (2024) menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan sarana prasarana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Utara, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produktivitas kerja dibandingkan dengan sarana prasarana, Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerapan K3 adalah pelatihan K3, penyediaan alat pelindung diri (APD), dan inspeksi keselamatan kerja, dan Variabel yang

paling berpengaruh terhadap sarana prasarana adalah ergonomi tempat kerja, pencahayaan, dan temperature. Beta Galeria (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Purworejo" mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelaksanaan K3 dan pencegahan kecelakaan kerja pada pegawai BPBD Kabupaten Purworejo. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan K3, maka semakin rendah pula angka kecelakaan kerja. menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitik. Jurnal yang berjudul "Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah" oleh Putri Elvisa (2023) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Meskipun hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan K3 di BPBD Kota Palu masih belum optimal, Putri Elvisa menambahkan upaya yang berbeda untuk bisa dilakukan dibandingkan penelitian oleh Kharisma, C. E. P. (2022) yakni perlu adanya pemberian pelatihan K3 bagi pegawai secara berkala, melakukan sosialisasi dan edukasi K3 bagi pegawai, menyusun SOP untuk K3, serta melibatkan semua pihak terkait dalam pelaksanaan K3. Yang terakhir dalam menjadi acuan penelitian peneliti ialah jurnal oleh Baja Kurnia (2020) yang berjudul "Faktor – Faktor Penyebab Rendahnya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Perusahaan Bidang Pekerjaan Konstruksi" menyampaikan bahwa menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan bidang pekerjaan konstruksi terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut meliputi kurangnya pengetahuan, komitmen, dan kesadaran, sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari ketatnya persaingan usaha yang menyebabkan perusahaan fokus pada efisiensi biaya dan mengabaikan aspek K3, kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya K, serta lemahnya penegakan hukum K3 oleh pemerintah. menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini mengkaji Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh yang belum pernah dikaji sebelumnya. Penelitian bertema keselamatan dan keamanan kerja belum banyak membahas dalam lingkup BPBD Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana K3 diterapkan dalam lingkup perkantoran pemerintahan di Indonesia.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3) pada pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, beserta faktor penghambat dan upaya mengatasi kendala tersebut.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan berpikir secara induktif sehingga dapat memberi gambaran mengenai penerapan keselamatan serta kesehatan kerja pada Badan Penanggulangan Daerah. Lingkup penelitian yang diambil oleh peneliti berpedoman dari teori Anwar Prabu Mangkunegara, yang terdiri



dari lima dimensi, yaitu lingkungan kerja, suhu udara, penerangan, pemakaian peralatan kerja, dan kondisi pegawai. peneliti menggunakan ketiga-tiganya yakni orang, tempat, dan kertas. Dimana Orang berarti sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari seseorang seperti melalui sebuah wawancara. Pada penelitian yang peneliti lakukan, sumber data person peneliti adalah pejabat yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan pegawai setempat. Place (tempat) adalah lokasi dimana peneliti melaksanakan penelitian yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Paper merupakan suatu sumber data yang berupa gambar, angka, huruf atau simbol. Adapun yang menjadi informan ialah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekertaris BPBD, Kasubag Perencanaan BPBD, Kasubag Kepegawaian dan Umum, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan perwakilan Pegawai di lingkungan BPBD. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, yang kemudian dianalisis berdasarkan Miles dan Huberman (2017) yang terdiri dari penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penerapan K3 di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya**

Sangat penting bagi setiap tempat kerja menerapkan K3 hal tersebut dikarenakan keselamatan dan kesehatan kerja adalah serangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang tenang serta aman bagi seluruh tenaga kerja pada perusahaan atau tempat kerja yang bersangkutan (Suma'mur 2001:2). Untuk melihat keberhasilan penerapan K3 pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat berdasarkan pendapat Mangkunegara bahwa hal tersebut mengarah ke suatu situasi yang aman atas kerusakan, penderitaan, serta kerugian di tempat kerja. Indikatornya penilaiannya yaitu: (1) Lingkungan kerja, (2) Suhu udara, (3) Penerangan, (4) Pemakaian peralatan kerja, (5) Kondisi Pegawai.

Pertama, lingkungan kerja sangatlah penting bagi setiap orang yang berada di tempat kerja, ini dikarenakan lingkungan kerja adalah tempat dimana seseorang beraktivitas melakukan tugasnya. Jika dilihat dari informasi yang didapatkan dari informan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan K3 pada indikator lingkungan kerja BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kebersihannya sudah diterapkan dengan baik hanya saja pada kerapian penyimpanan berkas-berkas dan pengaturan peletakan barang yang belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, dilihat pada Gambar 4.4 yang belum sesuai dengan prinsip dari K3 yaitu Prinsip 5R ( Rapi, Ringkas, Resik, Rawat dan Rajin). Tentunya hal tersebut perlu diperhatikan karena dengan banyaknya berkas dan penumpukan barang yang tidak sesuai prinsip K3 dapat membuat ketidaknyamanan pegawai dalam bekerja dan membuat keterbatasan gerak bagi pegawai dalam bekerja.

Kedua, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenyamanan pegawai, hal tersebut karena suhu udara dapat mempengaruhi produktivitas dan meningkatkan cara berfikir pada saat bekerja, apa bila terjadi kesalahan dalam menempatkan seseorang untuk bekerja pada suhu tertentu dapat membahayakan pekerja, dengan suhu ruangan yang terlalu panas akan membuat pekerja mengalami dehidrasi dan kelelahan yang cepat pada saat bekerja. Oleh karenanya sangat penting bagi setiap tempat kerja untuk selalu memperhatikan suhu di tiap ruangan kerja. Bersumber dari informasi yang peneliti dapatkan dari informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suhu udara di ruang kerja BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan indikator penerapan K3 menurut Mangkunegara, keberhasilan penerapan indikator suhu udara dapat terlihat dari kenyamanan para pegawai ketika bekerja di dalam ruangan dan juga peneliti secara langsung merasakan kondisi suhu dalam ruangan maupun di luar ruangan BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya yang terasa sejuk walaupun pada saat kondisi cuaca Kabupaten Aceh Barat Daya yang sangat panas.

Menurut International Labour Organization (ILO) banyak pekerja yang mengatakan bahwa penerangan yang buruk ditempat kerja menyebabkan mata menjadi mudah lelah, fatigue atau kecapean kerja, sakit pada kepala, stres, serta dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Akan tetapi dengan pencahayaan yang berlebih juga berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja seperti silau, sakit kepala dan stres. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencahayaan yang dimiliki BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sudah sesuai dengan standar penerapan K3, hal tersebut dapat dilihat bahwa BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dapat memanfaatkan pencahayaan alami yaitu cahaya matahari dengan baik, serta dengan memanfaatkan penggunaan pintu kaca serta jendela kaca sehingga intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan dapat terdistribusi dengan baik dan cukup. Kemudian dengan penggunaan pencahayaan buatan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami, bahwa BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan lingkungan yang memungkinkan seseorang di tempat kerja dapat melihat secara detail serta BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya telah memberikan pencahayaan dengan intensitas cahaya yang tetap menyebar secara merata ke seluruh ruangan, tidak menyilaukan, tidak redup dan tidak menimbulkan bayang-bayang. Pemakaian peralatan kerja sangat penting terlebih pada pekerja yang bertugas turun langsung ke lapangan yang memiliki resiko lebih mengalami kecelakaan kerja, itu sebabnya pemakaian peralatan kerja harus dilakukan sesuai prosedur dan harus selalu ditaati untuk dapat mengurangi risiko kecelakaan pada saat bekerja. Tidak hanya pada pemakaiannya saja tapi harus memperhatikan kondisi peralatan kerja tersebut, apakah peralatan kerja masih layak untuk digunakan atau peralatan kerja sudah tidak layak untuk digunakan lagi, karena apabila peralatan kerja tersebut sudah tidak layak untuk digunakan dan sengaja maupun tidak sengaja terpakai oleh pekerja maka akan sangat membahayakan pekerja tersebut. Peralatan kerja yang sudah tidak layak untuk dipakai akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang dapat membahayakan siapa saja yang memakainya dan meningkatkan kerugian bagi tempat kerja. Peralatan kerja yang tadinya digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja ketika sudah tidak layak untuk digunakan maka fungsi keselamatan dari peralatan kerja tersebut menjadi hilang. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan di atas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan K3 pada pemakaian peralatan kerja masih belum diterapkan dengan sepenuhnya, hal tersebut dapat peneliti lihat dari masih adanya pekerja yang melakukan pekerjaannya dengan kurang teliti. Pekerja tersebut mengabaikan kondisi keselamatannya dengan lupa memakai peralatan kerja dengan lengkap dan beralasan bahwa pekerja tersebut sedang menangani keadaan darurat sehingga lupa memperlengkap keselamatan diri dengan peralatan kerja. Padahal apabila dalam keadaan darurat seharusnya para pekerja harus lebih teliti dalam memperhatikan keselamatannya pada saat bekerja karena untuk menyelamatkan nyawa orang lain, pekerja harus terlebih dahulu memastikan bahwa keadaannya mampu serta layak untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Setiap tempat kerja tentunya membutuhkan tenaga kerja atau pegawai untuk menjalankan segala urusan yang ada pada tempat kerja tersebut, tidak cukup dengan membutuhkan pegawai saja akan tetapi tempat kerja tentunya membutuhkan pegawai yang mampu untuk melaksanakan tugas, peran dan fungsi yang telah diberikan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka pegawai yang dimiliki harus selalu dalam kondisi fisik dan mental yang bagus agar produktivitas dan kinerja pegawai semakin maksimal. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan K3 pada kondisi pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sudah diterapkan dengan baik, dari upaya yang dilakukan oleh para pegawai serta pimpinan BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menjaga kebugaran dengan melaksanakan kegiatan olahraga rutin setiap hari Jumat, kemudian dalam pengaturan piket keamanan serta kesiapsiagaan yang dibagi menjadi tiga shift membuat para pegawai memiliki waktu luang lebih dalam menjaga kebugarannya

sehingga dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana para pegawai dalam kondisi yang prima

### **3.2. Faktor Penghambat Penerapan K3 pada Lingkungan Kerja di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya**

Setiap kebijakan dan pekerjaan tidak akan terlaksana apabila terdapat suatu hambatan yang menjadi gangguan dari pekerjaan tersebut. Hambatan dapat memperlambat lajunya suatu kebijakan bahkan dapat mengagalkan tercapainya tujuan dari penerapan kebijakan tersebut. Menurut Rochman Natawijaya dalam Sutriyanto (2009:7), hambatan belajar merupakan suatu peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam penerapannya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan keterbatasan anggaran yang didapatkan BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya menyebabkan kurangnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), peralatan kerja hingga sarana prasarana penunjang kerja. Hal inilah yang menyebabkan penerapan K3 pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi terhambat sehingga sulit untuk mencapai aspek-aspek dari K3.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya yang sudah lengkap akan tetapi jumlah yang dimiliki dari sarana prasarana yang tersebut masih kurang, seperti BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki perahu karet akan tetapi perahu karet yang dimiliki tersebut hanya berjumlah 3 buah dan hanya 2 buah yang dapat dipergunakan dengan layak sedangkan 1 buah perahu karet lagi dalam keadaan yang rusak dan tidak layak untuk dioperasikan.

Masih kurangnya kesadaran pekerja akan keselamatan diri sendiri dan lebih mementingkan kenyamanan untuk tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja yang dianggap mengganggu gerak pada saat bekerja, sehingga tidak jarang para pekerja ketika melakukan kegiatan yang turun langsung ke lapangan dalam keadaan darurat lupa atau bahkan dengan sengaja untuk tidak menggunakan peralatan kerja atau alat pelindung diri dengan lengkap.

Selain itu, kurangnya ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dimiliki BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki 2 gedung yang berupa, 1 Gedung utama dan 1 Gedung PUSDALOPS, maka dari pada itu salah satu upaya untuk mengurangi risiko kebakaran yang parah dan memberikan rasa aman dari bencana kebakaran kepada setiap orang yang berada pada gedung tersebut tentunya APAR yang diperlukan harus lebih dari 2 buah untuk disebar penempatannya pada 2 gedung BPBD tersebut agar memaksimalkan penerapan K3. K3 yang diterapkan belum sesuai dengan standar penerapan K3 yang ada seperti halnya pada peletakan APAR, peletakan APAR sendiri telah diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 mengenai syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, akan tetapi pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya belum menerapkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, peletakan APAR masih dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dibuat dari BPBD itu sendiri yang tentunya sangat jauh dari standar penerapan K3 yang ada. Yang terakhir, pengawasan terhadap aktivitas pekerja dan penggunaan peralatan kerja serta APD yang masih kurang sehingga menyebabkan tingginya tingkat risiko kecelakaan kerja yang ada, kurangnya pengawasan tersebut terjadi disebabkan karena sudah menjadi suatu kebiasaan bagi para pegawai di BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga pimpinan pun sudah tidak lagi menegur apabila terdapat pegawainya yang tidak melakukan aktivitas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah berlaku, dan juga antara pegawai yang satu dengan yang lainnya tidak saling menegur atau bahkan mengingatkan, hal tersebut terjadi karena para pegawai saling merasa tidak melakukan kesalahan dan atau tidak menegur karena para pegawai sendiri juga melakukan kesalahan yang sama.

### **3.3. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Mengatasi kendala Pada Penerapan K3**

Ada beberapa permasalahan yang peneliti dapatkan dari proses observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga kiranya perlu ada upaya yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan khususnya permasalahan sesuai judul yang peneliti ambil yaitu dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Ada beberapa poin penting yang sedang direncanakan serta dilakukan untuk meningkatkan penerapan K3 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Berikut upayanya:

1. Mendata kembali sarana prasarana dan peralatan kerja yang telah dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk selanjutnya dapat diketahui berapa jumlah kekurangannya, dengan mendata kembali sarana prasarana yang ada maka BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya akan dapat menentukan berapa dan apa-apa saja sarana prasarana yang masih kurang sehingga dari mengetahui hal tersebut kemudian BPBD dapat memasukkan permintaan dan atau usulan untuk penambahan sarana prasarana pada perencanaan penambahan sarana prasarana selanjutnya agar dapat menunjang kegiatan pekerjaan sehingga dapat mencapai aspek-aspek dari K3.
2. Meninjau kembali kelayakan sarana prasarana dan peralatan kerja yang ada karena dengan melakukan peninjauan kembali maka akan diketahui kelayakan dari sarana prasarana yang telah dimiliki untuk kemudian dapat memusnahkan sarana prasarana dan atau peralatan kerja yang kiranya sudah tidak layak untuk di pakai lagi.
3. Mensosialisasikan penggunaan peralatan kerja dengan rutin agar pekerja dapat menjadikan pemakaian peralatan kerja sebagai suatu kebiasaan, kemudian kebiasaan tersebut dapat menjadi suatu perilaku dan akhirnya menjadi suatu budaya positif yang dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Didasarkan pada referensi penelitian sebelumnya, mayoritas penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan beberapa penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 di berbagai organisasi masih belum optimal, dengan beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti kurangnya pengetahuan, komitmen, dan kesadaran tentang K3, Sarana dan prasarana K3 yang belum memadai, Pelatihan K3 yang belum optimal, Sosialisasi dan edukasi K3 yang belum menyeluruh, Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan K3, serta faktor eksternal seperti ketatnya persaingan usaha dan lemahnya penegakan hukum K3. Beberapa penelitian fokus pada penerapan K3 secara keseluruhan, sementara penelitian lain fokus pada aspek tertentu dari K3, seperti ergonomi perkantoran atau pencegahan kecelakaan kerja. Hasil penelitian pun menunjukkan variasi dalam tingkat penerapan K3 dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Maka dari itu, penelitian tentang penerapan K3 menunjukkan bahwa K3 masih menjadi isu penting di berbagai organisasi. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan penerapan K3, dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti manajemen, pekerja, dan pemerintah.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian mengenai Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ini dapat disimpulkan bahwa Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya belum diterapkan dengan maksimal, ada 5 dimensi K3 menurut Mangkunegara (2016) yang peneliti jadikan pengukuran keberhasilan dan 5 dimensi tersebut belum semua terlaksana

dengan baik, 5 dimensi pengukuran K3. Penerapan K3 pada Lingkungan Kerja BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya belum diterapkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari penempatan dan penyimpanan barang yang tidak sesuai dengan prinsip K3 yaitu 5R (Rapi, Ringkas, Resik, Rawat, dan Rajin) sehingga membuat ketidaknyaman pegawai dalam bekerja dan membatasi ruang gerak pegawai dalam bekerja. Penerapan K3 pada suhu udara sudah baik, dengan adanya Air Conditioning (AC) dan kipas angin yang terpasang disetiap ruangan, dan juga didukung dengan sirkulasi udara dari ventilasi dan jendela sehingga membuat pegawai nyaman dalam bekerja. Berikutnya, penerapan K3 pada penerangan dan pemanfaatan pencahayaan alami dan pencahayaan buatan serta memvariasi intensitas cahaya yang ada sehingga pendistribusian terangnya cahaya dengan cukup membuktikan bahwa penerapan K3 pada pencahayaan BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya terlaksana dengan baik. Penerapan K3 pada pemakaian peralatan kerja belum terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pegawai yang mengabaikan keselamatan dengan tidak menggunakan peralatan kerja dengan lengkap serta masih ditemukan peralatan kerja yang sudah rusak yang dapat mengakibatkan resiko kecelakaan pada saat bekerja bagi para pegawai. Lalu, penerapan K3 pada kondisi pegawai BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya sudah dijalankan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan kegiatan positif berolahraga serta pengaturan kerja yang dibagi menjadi 3 shift pagi, siang, dan malam sehingga para pegawai memiliki waktu luang lebih untuk menjaga kebugaran serta kesehatannya.

Faktor-faktor yang menjadi kendala Penerapan K3 Pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga kurangnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya penerapan K3 sehingga dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dengan cara: (!)mendata dan meninjau kembali sarana prasarana yang dimiliki agar diketahui jumlah kekurangannya dan kelayakan sarana prasarana yang ada; (2)Meninjau kembali kelayakan sarana prasarana dan peralatan kerja yang ada karena dengan melakukan peninjauan kembali maka akan diketahui kelayakan dari sarana prasarana yang telah dimiliki untuk kemudian dapat memusnahkan sarana prasarana dan atau peralatan kerja yang kiranya sudah tidak layak untuk di pakai lagi; dan (3)Mensosialisasikan penggunaan peralatan kerja dengan rutin agar pekerja dapat menjadikan pemakaian peralatan kerja sebagai suatu kebiasaan yang dapat mendukung kesuksesan penerapan K3 pada BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya. **Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan dalam penelitian ialah waktu dan lokasi penelitian, sehingga masih belum dapat menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. **Arah Masa Depan Penelitian:** Peneliti menyadari belum banyak yang membahas objek penelitian serupa, sehingga ke depannya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan kolaborasi terhadap pencegahan cuaca ekstrem dengan metode yang lebih disempurnakan lagi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2024). Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Serta Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja di Surabaya. *Rekayasa: Jurnal Teknik Sipil*, 6(1), 83-95.
- BPJS Ketenagakerjaan, (2023). Data kecelakaan Kerja di Indonesia.
- Elvisa, Putri. (2023). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. IPDN.
- Galeria, Beta. (2023). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Pegawai Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo. IPDN.
- ILO. (2018). Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Muda Pengertian Keamanan Keselamatan Kerja dikutip pada 13 Oktober 2023 di situs <https://fatkhan.web.id/pengertian-dan-tujuan-kesehatan-keselamatan-dan-keamanan-kerja-k3/>
- Jackson, R. L. M.-J. H. (2011). *Human Resource Managemeny*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kharisma, C. E. P. (2022). Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Kurnia, M. B. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Perusahaan Bidang Pekerjaan Konstruksi. *Jurnal Student Teknik Sipil*, 2(2), 141–146.
- Lontaan, G. J., Taroreh, R. N., & Roring, F. (2024). Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Serta Sarana Prasarana Terhadap Produktivitas Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 8(2), 1-111.
- Muniasari, Nadya Pri. (2021). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Ergonomi Perkantoran Bagi Keselamatan serta Kesehatan Kerja Karyawan di PT Coda Integra Intermusa*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- Shahibah, Balqis. (2012). *Penerapan Keselamatan (K3) Bagi Tenaga Kerja Pembangunan Proyek Double Track Kereta Api Jalur Jatinegara – Manggarai Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012*
- Suma'mur. (2001). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*. Gunung Agung.
- Suprayitno, Hitapriya, and Ria Asih A. Soemitro. (2019). “Pemikiran Awal Tentang Prinsip Tindakan Mitigasi Preventif Resiko Bencana Alam Bagi Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas.” *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 3(1).
- Sutriyanto. (2009). Faktor Penghambat Pembelajaran Bolavoli Siswi Kelas X MAN 3 Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: FIK UNY.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Wahdania, Nanda. (2021). *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Serta Kesehatan Kerja di PT Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU)*.

Zega Putra Rahmat Jaya. (2024). *Analisis Penerapan Kesehatan Dan Kesehatan Kerja Pada BPPD Kabupaten Nias Utara*. LPPM Universitas Nias.

